

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi yuridis politik dinastidi Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 bahwa dinamika politik lokal merupakan bagian dari refleksi 'wajah' politik nasional, dan membuka ruang bagi terciptanya politik dinasti, walaupun lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat yang tidak menginginkan adanya politik dinasti. Kenyataannya menunjukkan lahirnya Undang-Undang pilkada membuka keikutsertaan keluarga dari petahana dalam politik dinasti. Melihat data beberapa politik dinasti ternyata Undang-Undang tersebut berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah. Dampak politik dinasti di Pemerintahan Kabupaten Bima yaitu sebagai berikut: politik dinasti dianggap hanya melenggangkan kekuasaan segelintir orang, kelompok-kelompok yang melakukan praktek politik dinasti politik membajak pemilu melalui kekuatan-kekuatan modal politik yang telah dibina secara turun-temurun sehingga kompetisi dalam pemilu tidak *fair* dan kecil kemungkinan terpilihnya orang-orang yang berkompeten tapi tidak memiliki modal untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan, sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih,

dan politik dinasti tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena bukan negara kerajaan.

2. Pelaksanaan politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2020, dimana kelompok-kelompok yang menerapkan dinasti politik menguasai posisi strategis pemerintahan, baik kepala daerah maupun DPRD, yang membuat posisi tersebut dengan segala kewenangannya menjadi alat bagi dinasti untuk mengakses sumber daya ekonomi. Isu korupsi yang melibatkan anggota dari mereka yang ada dalam lingkaran politik dinasti menjadi bukti tidak terbantahkan. Terlebih lagi apabila dinasti juga menguasai birokrasi di daerah serta politik dinasti membutuhkan dana besar untuk merawat kekuasaan dan jaringan di partai, ormas keagamaan, ormas kepemudaan dan simpul-simpul politik lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Adanya politik keluarga bukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan saja namun diharapkan dapat memberikan pengaruh yang dapat menunjang pembangunan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta masyarakat harus menjadi kontrol dengan adanya politik dinasti.
2. Masyarakat harus lebih jeli lagi dalam memilih pemimpin berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, bukan berdasarkan sejarah kepemimpinan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Cetak

- A.S.S Tambunan, 2002. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publishers, Jakarta.
- Afan Gaffar, 1992. *Pembangunan Hukum dan Demokrasi, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Dwiyanto, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Ahmad Suaedy, 2000. *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, LKIS, Yogyakarta.
- Anggriani Alamsyah. 2012. *Etika Politik*. Makassar: Alauddin University Press.
- Azhary, 2014. *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta; UI-press, 1955), dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Thaib, 1999. *Kedaulatan Rakyat Negara hukum dan Konstitusi, Liberty*, Yogyakarta.
- Donald A. Rumokoy, 2011. *Perkembangan Tipe Negara dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya*. UUI press, Yogyakarta.
- Fatahullah Jurdi. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gregorius Sahdan, 2002. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Haw Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heri Kuswanto, 2006, *Pengantar Ilmu Politik*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Hollyson Rahmat, 2015. *Pilkada; Penuh Euphoria, Miskin Makna*, Lestari, Jakarta.

- Ilham Yuli Isdiyanto, 2015. *Prinsip Umum Demokrasi Dan Pemilu*, Indie Book Corner, Yogyakarta.
- Leo Agustino, 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Busyro Muqoddas dkk, 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Michel Foucault, 2000. *Seks dan Kekusaan*, Gramedia, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2014. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muliansyah A. Ways, 2015. *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik Dan Welfare State*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Munir Fuady, 2010. *Konsep Negara Hukum Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Ni"matul Huda, 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nurhamin Nahar Usman. 2015. *Percepatan Dan Perlambatan Demokrasi Ditingkat Lokal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Pusham, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- R. Abdoel Djamil, 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert A Dahl, 1999. *Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara singkat*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- S. Toto Pandoyo, 1984. *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-undang Dasar 1945, Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2008. *Negara Hukum. yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta.

Sayudi. 2014. *Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Hukum.

Sedarmayanti, 2004. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"*, Mandar Maju, Bandung.

SF. Marbun, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Siti,R Zuhro,2009. *Demokrasi Lokal, Peran Aktor dalam Demokratisasi*, Ombak, Yogyakarta.

Syamsul Wahidin, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Theodrik Simorangkir, 2011. *Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Ways A Muliansyah, 2015. *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, Buku Litera, Yogyakarta.

B. Jurnal

B. Arief Sidharta, 2004. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Lentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun 11, November 20

Ciaran Cronin, Bourdieu and Foucault, 1999. *on Power and Madernity*. Philosophy Social Criticism, 1999. Vol.22, hlm 55-85.

Esty ekawati, 2015. dilema politik dinasti di Indonesia 2015, *artikel, dalam situs <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1050-dilema-politik-dinasti-di-indonesia>*.

Fales, Suimi, 2018. "Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* vol 3. Nomor 2, hlm. 199-210.

Haryanto, *Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakar di Sulawesi Selatan)*.

Indonesia : Local Strongmen dan Roving Bandits", *Jurnal Jebat: Journal of History, politics &*

Masda Putri Amelia, 2015 "Membangun Dinasti Politik Melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan Pda Walikota Probolinggo". *Jurnal Politik Muda*, Vol.4, No.3 h. 319-327.

- Mohammad Agus Yusoff, 2010. "Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di *Strategic Studies*, Volume 37, Nomor 19, h. 86-89.
- Mustopa, 2018. *Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia*, tesis strata dua (S2), Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Rozali. 2015. *Fenomena Dinasti Politik Pemerintahan Desa*. Tanjung Pinang: Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Suparman Marzuki, 2010. "*Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi "Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.87.
- Susi Dwi Harijanti, 2011. *Negara Hukum yang Berkeadilan*" Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M. CL, (Bandung: Pusat Study Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2011).
- Waiston R Djati. 2013. *Revivalisme Kekuasaan Familisme Dalam Demokrasi: dinasti Politik Di Arus Loka*;; *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol, 18, No 2, Juli 2013, h. 206.

C. Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Republik Indonesia, Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang pengujian undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

D. Website

Mahkamah konstitusi, pengertian politik dinasti, dalam situs <http://mkri.id/index.php?page=web.berita&id=11428>.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA Rangga Ista Rakarasiwi
 NIM 61511A0143
 PROG. STUDI Ilmu hukum

JUDUL DISETUJUI :

Analisis Hukum dan dampak dari Hukum Dinasti
kekuciraan (studi kasus kab. Bima)

Mataram, Rabu 4 November 2020
 Mahasiswa Pemohon,

Rangga Ista Rakarasiwi
 NIM. 61511A0143

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

Fitriani Amaliah, M.H
 (.....)

NIDN. 0826059302

Dosen Pembimbing Kedua,

Ady Supriat
 (.....)
080312801

Tanggal Penetapan 9/11/2020
 Dekan/ Ketua Prodi,

Anies Prati Dewi S.H., M.H
 NIDN. 0822078501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ⁷⁶
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0378) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Fangga Isra. Pakaraliwi
NIM : 01511 A0143
PROG. STUDI : Ilmu hukum
IPK : _____
DOSEN PS I : Ady Supryadi, S.H.M.H DOSEN PS II : Fitriani Amelia, S.H.M.H

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	13/2/21	Latar belakang proposal dan pendahuluan ^{Tinjauan pustaka}		✓
2	17/2/21	penyusunan dan latar belakang ^{Tinjauan pustaka}		✓
3	18/3/21	pendahuluan pembahasan, daftar pustaka		✓
4	30/3/21	penyusunan, daftar pustaka		✓
5	5/4/21	Tinjauan pustaka, penyusunan	✓	
6	12/4/21	penyusunan awal	✓	
7	27/5/21	penyusunan tata daftar pustaka	✓	
8	31/5/21	penutup dan surah	✓	

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

(Anies Prima Dewi, S.H.M.H)

NIDN. 082 807 8501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fakum.ummm@gmail.com

Jadwal : Ujian/Seminar Hasil Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun Akademik 2020/2021,

No	Hari/Tanggal	Jam	Nama & NIM	Judul Skripsi	Dosen Penguji dan Pembimbing	Konsent rasi	Tempat/ Fasilitas
1	Jum'at, 18 Juni 2021	09.00-10.00	RANGGA ISRA RAKARASIWI (61511A0143)	IMPLIKASI YURIDIS DARI DINASTI POLITIK BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA (Studi Kasus Kabupaten Bima)	1. Anies Prima Dewi, SH.,MH 2. Ady Supryadi, SH.,MH 3. Fitriani Amalia, SH.,MH	HTN	RUANG SIDANG FH UMMAT

Mataram, 09 Juni 2021
Ketua Program Studi

